

Analisis perencanaan penganggaran keuangan responsif gender pada kantor imigrasi Semarang

Dian Ambarisiwi ^{1*}

¹ Pegawai Imigrasi Semarang; Jl. Siliwangi No. 514 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

* Korespondensi: 83dian@gmail.com

Tanggal Diterima: 16 Juni 2023

Tanggal Revisi: 29 Juli 2023

Tanggal Terbit: 30 Juli 2023

Abstract

The purpose of this study is to analyze the financial budget gender responsive of the Semarang Immigration Bureau. This type of research is qualitative and descriptive. The data used are primary information obtained through in-depth interviews and office studies. The study included five whistleblowers who plan Semarang's immigration budget. The method of data analysis is descriptive qualitative analysis. This study concluded that the budget plan of Semarang Immigration Department works well according to the applicable regulations. Budgeting for the implementation of government action programs is the most important factor in sustaining the success of these action programs. Without an adequate budget an action plan or program is less likely to be implemented successfully. Therefore the work program budget should be prepared and well planned so that the work program is not burdened with expenditure and budget utilization. The success of budget planning is influenced by strategic factors such as transparency accountability internal control system organizational commitment and leadership of the budget planner. The budget planners accountability transparency internal control and managerial and organizational commitment will be better. Its as simple as that. Success criteria for budget planning must be met.

Keywords: action plan; immigration office budget plan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis anggaran keuangan responsif gender di Kantor Imigrasi Semarang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah informasi dasar yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran Kantor Imigrasi Semarang yang berjumlah 5 informan. Metode analisis data adalah analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran di Departemen Imigrasi Semarang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran untuk pelaksanaan program kerja pemerintah merupakan hal terpenting yang mendukung keberhasilan program kerja tersebut. Tanpa anggaran yang memadai, sangat tidak mungkin rencana atau program kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, anggaran program kerja harus disusun dan direncanakan dengan baik, sehingga program kerja tidak membebankan pembiayaan dan penggunaan anggaran. Keberhasilan perencanaan anggaran dipengaruhi oleh faktor strategis seperti transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan kepemimpinan perencana anggaran dan Artinya, semakin baik akuntabilitas, transparansi, pengendalian intern, manajemen dan komitmen organisasi perencana anggaran maka semakin mudah memenuhi kriteria keberhasilan perencanaan anggaran.

Kata kunci: rencana anggaran; rencana kerja kantor imigrasi

Cite This Article:

Ambarisiwi, D. (2023). Analisis perencanaan penganggaran keuangan responsif gender pada kantor imigrasi Semarang. *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, 1(1), 17-23. <https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1i1.2023.169>



Copyright: © 2023 by the authors.
Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Pendahuluan

Perencanaan dan penganggaran yang baik membutuhkan konsistensi dalam semua dokumen perencanaan dan penganggaran dari semua otoritas/lembaga pengelola infrastruktur. Keberhasilan perluasan infrastruktur harus didukung oleh anggaran keuangan yang memadai. Anggaran adalah rencana keuangan masa depan yang berisi ekspektasi manajemen atas pendapatan, pengeluaran, dan peristiwa keuangan lainnya dalam satu tahun. Terkait dengan anggaran suatu organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan rencana tersebut dan berapa serta bagaimana mendapatkan anggaran untuk membiayai rencana tersebut.

Pengertian anggaran itu sendiri adalah Supriyono (1990:15), penganggaran adalah perencanaan keuangan perusahaan, yang menjadi dasar pengendalian (monitoring) keuangan perusahaan untuk periode berikutnya. Anggaran merupakan rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana aksi jangka panjang yang diputuskan dalam proses penyusunan program. Antonio dan Govindarajan (2005:90) mendefinisikan anggaran sebagai rencana keuangan yang biasanya diperpanjang selama satu tahun dan menyediakan instrumen untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek. Tahapan anggaran merupakan tahapan yang sangat penting, karena anggaran yang tidak efisien dan disfungsi justru dapat menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya (Mardismo, 2009:45). Dalam praktiknya, penyusunan anggaran seolah menjadi bagian tersendiri dari perumusan dan perencanaan strategis, sehingga keberhasilan implementasi anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti itu tidak dapat menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi (Kuncoro, 2010:47).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Praktek Akuntansi Negara (SAP), dijelaskan bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tahapan-tahapan operasional yang saling berhubungan, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, kemudian tahap pelaksanaan dan pengelolaan. Tahapan akuntansi dan diakhiri dengan tahapan akuntansi pelaksanaan anggaran DPRD yang disajikan dalam laporan keuangan dan laporan kinerja. Oleh karena itu, untuk memahami pengelolaan ekonomi daerah dengan baik, tidak harus dipahami secara parsial atau terpecah-pecah. Misalnya, jika Anda ingin memahami akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, Anda setidaknya harus memahami aturan dasar perencanaan dan penganggaran, termasuk aturan dasar pelaksanaan dan pengelolaan anggaran.

Terdapat instrumen penganggaran berbasis kinerja yang dimana agar penerapan anggaran berbasis prestasi kerja dapat dilaksanakan dengan baik. instrumen tersebut adalah standar biaya, indikator kinerja, dan evaluasi kerja. Standar Biaya adalah acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial officer) (Kementerian Keuangan, 2013). Jadi, standar biaya terbagi dua yaitu standar biaya masukan yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output) dan standar biaya keluaran yang ditetapkan untuk menghasilkan output/suboutput. Standar biaya masukan dan standar biaya keluaran ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pada penyusunan Kertas Kerja RKA-K/L Tahun Anggaran 2023, setiap satker menyusun berdasarkan PMK yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Agar menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023, terdapat satuan biaya berupa indeks, harga satuan, dan tarif yang sudah ditetapkan pada standar biaya masukan. Peraturan ini dibuat agar tercapainya efisiensi pada penyusunan anggaran. Sehingga setiap Kementerian/Lembaga bisa lebih fokus terhadap kinerja yang akan menghasilkan suatu output.

Berangkat dari latar belakang diatas berikut adalah rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah penyusunan perencanaan anggaran responsive gender pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang lebih akurat dan sesuai target yang telah ditentukan. Adapun tujuan penulisan makalah adalah untuk mengetahui serta menganalisa penyusunan rencana anggaran responsive gender yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

2. Metode

Secara pengertian, Winarno menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yg teliti & sistematis. Selain Winarno. Sugiyono menjelaskan bahwa metode sebuah penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan & kegunaan tertentu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Objek penelitian adalah konsep kebijakan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam hal ini draft Renstra Ditjenim 2020-2024. Selain itu tulisan ini juga bertujuan memberikan penilaian (bersifat evaluatif).

Terdapat 2 (dua) sumber data yakni primer dan sekunder. Tulisan ini menggunakan kedua jenis data diatas yakni data primer: data yang diperoleh peneliti langsung dari tangan pertama, yakni hasil bahasan rapat atau kegiatan konsinyering terkait Rencana Kerja dan Anggaran, kemudian pembahasan langsung dengan pimpinan dan pelaksana pengampu tugas penyusunan Renstra maupun narasumber. Penulis pun termasuk dalam pelaksana penyusunan draft Rencana Kerja dan Anggaran.

Adapun data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra, kemudian dokumen pemerintahan seperti Narasi RPJMN ke-IV, draft Renstra Ditjenim 2020-2024 yang masih dalam penyesuaian serta postur anggaran TA 2023. Data dikumpulkan melalui observasi langsung karena penulis terlibat sebagai pelaksana penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023 baik dalam kegiatan pembahasan informal, rapat-rapat dalam kantor maupun rapat konsinyering yang melibatkan perwakilan dari Seksi pengampu tusi.

Teknik Analisis Data adalah suatu metode untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat dalam rangka menemukan solusi permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh penulis dalam rangka menyusun tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengolah data, dimana penulis melakukan proses penyuntingan atau seleksi data-data yang relevan saja pada Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023 dan dokumen pendukung lainnya untuk digunakan dalam menjawab pertanyaan masalah pada penelitian ini.
2. Menganalisa data, Penulis melakukan Analisa serta mengambil kesimpulan terhadap keputusan dan kebijakan pimpinan yang tertuang dalam draft Rencana Kerja dan Anggaran TA 2023

Dalam mendeskripsikan hasil Analisa dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan data dan informasi yang diperoleh oleh penulis, maka penulis mendeskripsikan hasil Analisa dalam sistematika tulisan sesuai ketentuan ilmiah metode yang digunakan dalam tulisan ini. Metode bisa mencakup tipe, jenis penelitian data sekunder atau yang lain, Teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

3. Hasil dan Pembahasan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi di era otomatisasi dan pertukaran data 4.0 melalui Internet of Things turut mempercepat arus putaran globalisasi. Globalisasi membuat manusia di seluruh dunia, seakan tidak terikat batas negara dan geografis, terhubung dan saling bertukar informasi kapan saja dan di

mana saja melalui media elektronik dan internet. Sehingga kemudian dikenal istilah world nation (negara global) yang hampir-hampir menggantikan kedaulatan state nation (negara bangsa). Namun demikian, meskipun globalisasi telah mengaburkan batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi, tetap tak mampu membatasi arus keluar masuk manusia secara fisik untuk melintasi batas-batas antar negara. Kehadiran fisik tetap dibutuhkan dan tidak dapat digantikan oleh identifikasi data. Bahkan mungkin nantinya perlintasan manusia antar negara bisa bertambah lagi intensitasnya menyesuaikan dengan semakin canggih, mudah dan murah nya pilihan moda transportasi yang ditawarkan.

Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mulai berdiri tahun 1981 dan efektif beroperasi sejak tahun 1982. Berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, keberadaan Kantor Imigrasi Semarang dengan jelas memiliki peran yang sangat penting. Terlebih dalam hal pelayanan publik dalam pengurusan hal-hal seperti dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, ijin tinggal dan status, intelijen, penyidikan, dan penindakan, lintas batas, dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian. Sejalan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor. 04.PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkeh. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi berubah status menjadi Kantor Imigrasi Semarang yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02 – PR.07.04 tahun 1983 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Imigrasi di lingkungan Kanwil Departemen Kehakiman R.I dan telah diperbaharui dengan SK. Nomor : M.03 – PR.07.04 tahun 1991 dan saat itu Kantor Imigrasi Semarang mempunyai wilayah kerja 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kotamadya. Pada akhir tahun 2002 terbit SK Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor M.05.PR.07.04 tahun 2002 tentang pembentukan Kantor Imigrasi 100 Pemalang, Wonosobo, dan Pati, dan sejak akhir tahun 2002 dengan sendirinya terjadi pengurangan wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang. Wilayah Kanim Klas I Semarang mulai akhir Desember 2002 menjadi 7 (tujuh) Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yaitu, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Purwodadi. Kantor Imigrasi Semarang sejak mulai berdiri tahun 1982 sampai dengan sekarang telah terjadi 9 (sembilan) kali pergantian Pimpinan. Demikian halnya jumlah karyawan telah menjalani perubahan yang cukup berarti yaitu dari jumlah semula hanya 24 (dua puluh empat) orang termasuk dengan struktural T.U sampai mencapai 72 (tujuh puluh dua) orang dengan pejabat Teknis. Dan yang terbaru sekarang jumlah pegawai ada 63 orang. Berkurangnya pegawai dikarenakan banyak terjadi mutasi.

Penyempurnaan sarana dan prasarana khususnya gedung Kantor dan fasilitasnya dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun. Bila sebelumnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi masih menempati Jl. Kolonel Sugiono 4 (Regang) yang saat itu masih merupakan Kantor Imigrasi Daerah Semarang yang kemudian pindah menjadi satu dengan Kantor Balai Harta Peninggalan di Jl. H.A Salim dan mulai tahun 1977 sampai sekarang Kantor Imigrasi Semarang menempati kantor yang permanen dan cukup representatif di Jalan Siliwangi No. 514 Krapyak, Semarang. Prasarana gedung yang telah tersedia antara lain Ruang Arsip, Ruang Karantina, Ruang Pelayanan, Tata Usaha dan Mushola. Kegiatan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Semarang lebih terfokus kepada pelayanan seperti pemberian SPRI, pemberian Izin Tinggal bagi orang asing serta perpanjangan Izin Tinggal.

Tidak ketinggalan pula faktor penegakan hukumnya, melalui Sistem Pengawasan Orang Asing yang sedang dijalankan oleh Kantor Imigrasi Semarang mampu mengantisipasi segala bentuk pelanggaran keimigrasian yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang. Dalam menggunakan sarana kerja atau administrasi khususnya menyangkut sistem pencatatan pelayanan dan pelaporan sejak tahun 1998, telah menggunakan komputerisasi. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan di bidang keimigrasian. Pelaksanaan tugas pokok secara teknis mengacu pada ketentuan juklak (petunjuk pelaksanaan) Direktur Jenderal Imigrasi sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Dalam rangka perencanaan penganggaran yang mendasarkan pada isu gender hingga kini belum ditemukan adanya isu gender mengingat pelayanan keimigrasian telah melakukan pelayanan secara khusus pada perempuan, anak dan lansia. Melalui penggaran kinerja yang dilakukan kemigrasian menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan telah tersirat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005- 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014. Selain itu, Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan pencapaian kesetaraan gender yang tercantum dalam salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs). Kerangka pikir yang responsif gender diperlukan dalam operasionalisasi program dan kegiatan pembangunan khususnya dalam mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan antara perempuan dan laki-laki (generasi tua maupun muda). Reduksi kesenjangan mutlak dilakukan guna memberikan perhatian dan kesempatan berkembang bagi seluruh pelaku untuk berpartisipasi dalam kegiatan.

Pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi komitmen internasional dan nasional sejak dikukuhkannya Beijing Platform For Action pada 1995. Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan salah satu wujud pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Pembahasan perencanaan anggaran dan kinerja sangat penting karena anggaran yang dialokasikan untuk setiap program atau proyek dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan perencanaan anggaran dan kinerja yang terjadi pada bidang keimigrasian yaitu:

1. Perencanaan penganggaran responsive gender belum diberlakukan mengingat jenis layanan yang diberikan bersifat umum dan belum mengkhususkan pada kesenjangan gender.

2. Perencanaan anggaran membantu dalam menentukan target kinerja untuk setiap program atau proyek yang dibiayai. Dalam proses ini, organisasi dapat menentukan tujuan yang ingin dicapai dan mengukur kinerja mereka terhadap tujuan tersebut. Dengan menetapkan target kinerja yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Proses perencanaan anggaran membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka. Dalam proses ini, organisasi dapat mengevaluasi program atau proyek mana yang paling efektif dan memperbaiki program atau proyek yang kurang efektif. Dengan memperbaiki program atau proyek yang kurang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya mereka.
4. Perencanaan anggaran dan kinerja membantu organisasi dalam mengukur kinerja mereka terhadap target yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, organisasi dapat menilai kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan memperbaiki area yang perlu diperbaiki, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan Akuntabilitas. Perencanaan anggaran dan kinerja membantu dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi. Dalam proses ini, organisasi dapat memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan digunakan dengan efektif dan transparan. Dengan meningkatkan akuntabilitas, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pemangku kepentingan mereka.

Secara keseluruhan, pembahasan perencanaan anggaran dan kinerja membantu organisasi dalam mencapai tujuan mereka dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan menetapkan target kinerja yang jelas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengukur kinerja, dan meningkatkan akuntabilitas, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan dituliskan penjelasan mengenai bahan dan metode penelitiannya.

4. Kesimpulan

Pada perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran program keimigrasian akan berfokus pada penguatan fungsi keimigrasian dalam pengamanan negara serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran yang dimaksud merupakan pergeseran pada fokus program imigrasi di Tahun 2020-2024 yang meletakkan prioritas organisasi pada upaya peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.

Pada kantor Imigrasi kelas I TPI Semarang dalam beberapa kesempatan telah melibatkan pegawai untuk ikut ambil bagian dalam partisipasi penyusunan anggaran dengan cara membiarkan pegawai untuk menyampaikan usulan atau pendapat yang berkaitan dengan penyusunan anggaran sehingga nantinya anggaran dapat direalisasikan dengan baik.

Netral gender adalah yang terjadi pada proses perencanaan dan penganggaran mengingat isu gender yang berkembang telah diantisipasi melalui berbagai program inovatif yang memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak serta lansia.

Ucapan Terima Kasih

Kontribusi Penulis

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.

Pernyataan Dewan Kaji Etik

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan Atas Dasar Informasi

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data**Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

imigrasi.go.id <http://semarang.imigrasi.go.id>

Nafarin, M. 2015. Penganggaran Perusahaan Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024

Rahayu, Sri dan Rachman, Andry Arifin. 2016. Penyusunan Anggaran Perusahaan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rizki, Teknik Analisa Data Kualitatif, Kuantitatif Menurut Para Ahli. 09-04-2020. Diakses pada 10 April 2020. https://pastiguna.com/teknik-analisisdata/#Teknik_Analisi_Data_Deskriptif_Kualitatif

Saputro, Adi Gunawan. 2015. Anggaran Perusahaan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Wikipedia, Penelitian Kualitatif, Diakses pada 10 April 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4f36a-buku-pprg-bidang-perdagangan.pdf>